

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BPKD KABUPATEN BIREUEN

[THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY ON FINANCIAL MANAGEMENT AT THE BPKD OF BIREUEN REGENCY]

Nurul Anjani^{1*}, Emi Safrina¹, Sulaiman Sulaiman¹

¹ Program Studi Administrasi Bisnis FISIP Universitas Almuslim Bireuen – Aceh

*Corresponding author: Nurul Anjani, email: anjaninurul739@gmail.com

Received | Dec 9, 2024, Accepted | March 20, 2026, Published | March 29, 2026

ABSTRACT | This study analyzes the impact of accountability and transparency on financial management within the Bireuen Regency Government (focusing on the Bireuen Regency Regional Financial Management Agency/BPKD). A quantitative method was employed, involving the distribution of questionnaires to 72 BPKD employees. The results indicate that accountability influences financial management; in other words, accountability is a factor that can either enhance or diminish financial management. Transparency was also found to influence financial management; therefore, enhancing transparency is essential for improving financial management practices.

Keywords: accountability, transparency, financial management

ABSTRAK | Penelitian menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bireuen (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen). Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan membagikan kuesioner kepada 72 pegawai BPKD Kabupaten Bireuen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Artinya akuntabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan maupun menurunkan pengelolaan keuangan. Dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Oleh karenanya, untuk meningkatkan pengelolaan keuangan maka transparansi harus ditingkatkan.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, pengelolaan keuangan

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi. Pengelolaan keuangan yang andal dapat dipengaruhi oleh akuntabilitas publik. Sebagaimana disebutkan Tamara & Konde (2016) bahwa pengelolaan keuangan adalah keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan semua pengelolaan sumber daya publik dan laporan aktivitas. Pengelolaan yang andal juga dapat dipengaruhi oleh transparansi publik, transparansi publik adalah keterbukaan secara

sungguh-sungguh dan didasari pada prinsip bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui. Kedua hal ini menjadi bagian yang paling diamati oleh masyarakat, yaitu pemberian informasi yang transparan.

Ini merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan prinsip tersebut. Pengelolaan keuangan yang andal adalah pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat luas. (Tamara & Konde, 2016).

Tentunya Pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu: *Financial literacy*, *Financial socialization agents*, dan *Attitude toward money* (Arifa, 2019).

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas/program yang di rancang dan dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan masyarakat (Aziiz, 2019).

Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan seluruh kegiatan agen terhadap prinsipal (Mardiasmo, 2009). Termasuk dalam pengertian tersebut, akuntabilitas memiliki peran penting untuk menekan penyimpangan dan penyalahgunaan sumber daya bagi kepentingan publik (Jorge & Pattaro, 2011).

Akuntabilitas dapat digolongkan menjadi lima dimensi diantaranya: akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial (Aziiz, 2019).

Akuntabilitas pengelolaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi penganggaran (Sapartiningsih *et al.*, 2018). Faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa ialah komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat (Perdana, 2018).

Sesuai fenomena di lapangan pemerintah harus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan *good governance* reformasi dalam penyajian pengelolaan keuangan, karena pemerintah masih kurang mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik.

Disamping itu dalam mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan di BPKD Kabupaten Bireuen bukanlah suatu hal yang mudah untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih banyak penyelewangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan BPKD Kabupaten Bireuen yang dilakukan oleh penyelenggara pengelolaan keuangan yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dalam kenyataannya tidak demikian adanya, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adanya penggunaan dana yang tidak jelas, adanya manipulatif dalam proses penggunaan dana APBN. Disamping itu pula terdapat indikasi lambannya penanganan proses penegakan hukum dalam setiap

kasus yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kurangnya pertanggungjawaban yang terbuka kepada publik sehingga banyaknya pengelapan dana APBD. Selain Akuntabilitas Transparansi juga sangat penting.

Transparansi Pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) (Jamaluddin *et al.*, 2022).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dalam Upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Research gap dalam penelitian ini terlihat dari penelitian Sihombing, (dkk) dengan hasil penelitian transparansi, LKPD dan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemda.

Transparansi dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu yaitu: Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya, Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat, Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancana), Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll, dan Keterbukaan menerima peran serta masyarakat. (Didjaja, 2017).

Permasalahan Transparansi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen ialah masih kurangnya informasi di setiap pengeluaran dan pendapatan belanja. Apabila tidak adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan tersebut maka dapat menghambat pengelolaan keuangan. Berdasarkan Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) yang diutuskan ke Kabupaten Bireuen, masih menemukan beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Bireuen, walaupun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi pengelolaan keuangan Bireuen, pejabat disana,

permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan (BPK) berupa temuan pemeriksaan dan Sistem Pengendalian Interen (SPI) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Adapun temuan Sistem Pengendalian Interen (SPI) antara lain; (1) pengelolaan uang di bendahara belum sepenuhnya tertib. (2) penagih utang pajak restoran belum optimal, dan (3) pengelolaan asset berupa peralatan dan mesin yang hilang yang dikuasai oleh pihak lain belum sepenuhnya memadai.

Masalah kepatuhan yang melenceng dari anggaran pemerintah antara lain; (1) kelebihan pembayaran belanja pegawai pada PNS cuti bersama dan tugas belajar. (2) kelebihan pembayaran pada badan penanggulangan bencana daerah. Dalam penyusunan anggaran setiap tahunnya tim anggaran eksekutif (tim pemerintah kabupaten). Menerima input dari setiap SKPD selanjutnya usulan tersebut dirumuskan kembali oleh tim anggaran kabupaten (TAPA) untuk menyusun RAPBD (Jamaluddin *et al.*, 2022).

Penelitian ini mengadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin (2022) dengan hasil penelitian hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi penganggaran dan transparansi baik secara parsial dan simultan terhadap pengelolaan keuangan di BPKD Kabupaten Bireuen.

LANDASAN TEORITIS

Akuntabilitas

Mardiasmo (2018) dalam (Suparyanto dan Rosad, 2020) mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawabandan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban memper-tanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Indikator yang peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Supardi (2017) dalam (Crystallography, 2016), menyebutkan bahwa ada 5

(lima) indikator akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yaitu: Terbuka, cepat dan tepat, selaras ketentuan hukum dan regulasi, perancangan APBD, pertanggung jawaban kepada publik dan memantau peforma manajemen.

Transparansi

Menurut Mursyidi (2015) bahwa memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur karena masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Selain itu Mahsun (2015) menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Suparyanto dan Rosad, 2020).

Indikator yang dikemukakan menurut Mardiasmo (2009) cocok untuk mengukur variabel Transparansi, indikator tersebut yaitu: Informatif (*informativeness*), keterbukaan (*openness*) dan pengungkapan.

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan menurut Yusanti (2020) adalah kegiatan pengelolaan uang dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki tujuan supaya memperoleh kesejahteraan keuangan. Menurut Ida dan Dwinta (2010) dalam Yusanti (2020) tugas utama pengelolaan uang adalah proses penganggaran, dengan tujuan untuk memastikan bahwa individu mampu mengelola kewajiban keuangan secara tepat waktu dengan menggunakan penghasilan yang diperoleh dalam periode yang sama.

Menurut Ida & Dwinta (2010) dalam (Siasale 2019) pengelolaan keuangan adalah cara mengatur dan mengendalikan keuangan serta asset Pengelolaan keuangan adalah bagian dari kegiatan manajemen pribadi yang merupakan proses seseorang atau individu untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan mengelola sumber keuangan secara tersusun tersusun dan sistematis Putri and Lestari (2019). Sedangkan menurut Kholifah dan Iramani (2013) dalam Yusanti

(2020), kemampuan seseorang dalam mengatur perencanaan, penganggaran, pencarian, pengelolaan, pemeriksaan, dan penyimpanan uang serta pengendalian kegiatan dalam sebuah keluarga.

Adapun indikator pengelolaan keuangan negara menurut UUKN terdiri atas; Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil; Asas proporsionalitas; Asas profesionalitas; Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan; dan Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Bireuen. Dimana data diambil dari keuesioner yang disebar. Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh Akutabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan populasi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada yang berada di BPKD Kabupaten Bireuen sebanyak 72 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehubungan jumlahnya terbatas, diambil semuanya, atau disebut sampling jenuh (Noor, 2011).

Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif, menurut Sugiyono (2017), metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner diberikan secara langsung kepada responden. Responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan, kemudian memintanya untuk mengembalikannya melalui peneliti yang secara langsung akan mengambil kuesioner yang telah diisi.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan peralatan analisis regresi liner berganda dan dengan menggunakan alat bantu program *software* aplikasi statistik SPSS versi 29.0.1 (*Statistical*

Package For Science). Pengujian hipotesis menggunakan model regresi linier berganda untuk mengetahui variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun parsial. Adapun persamaan linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Pengelolaan Keuangan

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi (Akutabilitas)

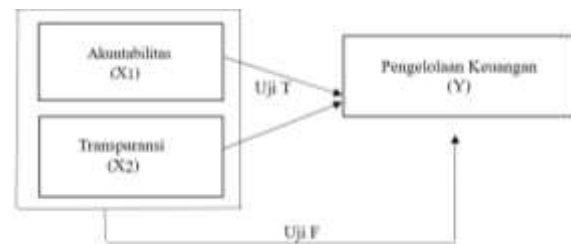
β_2 = Koefisien Regresi (Transparansi)

X_1 = Akutabilitas dan X_2 = Transparansi

ϵ = error

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu varibel bebas dengan varibel terikat.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah atau valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016).

Pada penelitian ini, validitas intrumen diujikan dengan korealsi rank-spearman r_{hitung} , jika lebih besar dari r_{tabel} dalam hal ini 0,1927, pada taraf 5% maka pernyataan tersebut valid. Sedangkan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pernyataan tersebut tidak valid. Hasilnya dinyatakan dalam tabel 1.

Berdasarkan hasil uji validitas dengan jumlah 72 responden dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan variabel yang diajukan untuk responden adalah valid karena dilihat dari nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,1927)

sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

Tabel 1. Uji Validitas Instrumen

No.	Variabel	r_{hitung}	r_{tabel}	Validitas
1	Akuntabilitas (X1)	0,660	0,1927	Valid
2		0,812	0,1927	Valid
3		0,419	0,1927	Valid
4		0,534	0,1927	Valid
5		0,747	0,1927	Valid
1	Transparansi (X2)	0,466	0,1927	Valid
2		0,823	0,1927	Valid
3		0,734	0,1927	Valid
1	Pengelolaan Keuangan (Y)	0,687	0,1927	Valid
2		0,697	0,1927	Valid
3		0,646	0,1927	Valid
4		0,651	0,1927	Valid
5		0,493	0,1927	Valid

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Data yang tidak reliabel, tidak dapat di proses lebih lanjut karena akan menghasilkan kesimpulan yang bias. Suatu alat ukur yang dinilai reliabel jika pengukuran tersebut menunjukkan hasil-hasil yang konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas dan di uji merupakan pernyataan atau pertanyaan yang sudah valid. Cronbach's alpha yang besarnya antara 0,50- 0,60. Dalam penelitian ini peneliti memilih 0,50 sebagai koefisien reliabilitasnya (Sugiyono, 2018).

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

No	Variabel	Butir Pernyataan	Cronbach's Alpha	Nilai Alpha
1.	Akuntabilitas (X1)	5	0.629	Reliabel
2.	Transparansi (X2)	3	0.502	Reliabel
3.	Pengelolaan Keuangan (Y)	5	0.692	Reliabel

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai Cronbach Alpha diatas 0,50 sehingga semua konsep pengukur reliabel (dapat diandalkan).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada penelitian ini, untuk mengetahui normalitas data dengan menggunakan uji statistik. uji statistik yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan uji

kolmogorow-smirnow, dengan kriteria yaitu jika nilai signifikansi atau probabilitasnya > dari 0,005 maka distribusi data adalah normal, sedangkan jika nilai signifikansi atau probabilitasnya < dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal.

Tabel 3. Uji Normalitas dengan K-S Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,40380134
Most Extreme Differences	Absolute	,051
	Positive	,050
	Negative	-,051
Kolmogorov-Smirnov		,051
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d

Hasil dari uji kolmogorow-smirnov test diperoleh dari nilai kormogorov-smirnov sebesar 0,051 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang lebih besar dari tingkat signifikat $\alpha=5\%$ atau $(0,051>0,05)$, maka H_0 diterima yang artinya data terdistribusi secara normal. Dengan demikian uji normalitas ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan *Collinearity Statistic Tolerance* (T) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasilnya berikut:

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Akuntabilitas_X1	,837	1,195
	Transparansi_X2	,837	1,195

Sesuai dengan ketentuan uji Multikolinearitas, Jika nilai tolerance $\geq 0,10$ dengan nilai VIF ≤ 10 maka tidak terdapat Multikolinearitas. Berdasarkan table di atas maka Akuntabilitas (X_1), nilai tolerance sebesar 0,837 (Lebih besar dari 0,10) dan nilai VIF sebesar 1.195 (Lebih kecil dari 10), artinya tidak terjadi multikolinearitas. Transparansi (X_2), nilai tolerance sebesar 0,837 (Lebih besar dari 0,10) dan nilai VIF sebesar 1.195 (Lebih kecil dari 10), artinya tidak terjadi multikolinearitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk menganalisis pengaruh variabel independen

yaitu Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan Keuangan, hasil analisis dapat dilihat pada tabel-5.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,022	1,588		4,423	<,001	
	Total_X1	,242	,080	,325	3,021	,004	,837
	Total_X2	,334	,100	,360	3,342	,001	,837

Maka hubungannya dinyatakan dalam persamaan regresi $Y = 7,022 + 0,242 X_1 + 0,334 X_2$.

- Konstanta b_0 (a) = 7,022 artinya jika akuntabilitas dan transparansi nilainya 0, maka pengelolaan keuangan nilainya positif sebesar 7022.
- Koefisien b_1 = 0,242 artinya jika variabel Akuntabilitas nilainya tetap dan transparansi ditingkatkan sebesar 1% maka pengelolaan keuangan akan meningkat sebesar 1,242%.
- Koefisien b_2 = 0,334 artinya transparansi nilainya tetap dan akuntabilitas ditingkatkan sebesar 1% maka pengelolaan keuangan akan meningkat sebesar 1,334%.

Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien Determinan digunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel tidak bebas yakni pengelolaan keuangan yang disebabkan oleh variabel bebasnya (Akuntabilitas dan Transparansi). Diperoleh:

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,575 ^a	,330	,311	1,424

Dilihat dari hasil pengujian tersebut dapat diketahui nilai *Adjusted R²* sebesar 0,311 yang berarti variabelitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabelitas variabel independen sebesar 31,1%.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji parsial (uji t) gunanya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. untuk pengujian hipotesis, penulis menggunakan analisis regresi berganda.

Uji Parsial (Uji Statistik T)

Uji ini digunakan untuk membuktikan pengaruh Akuntabilitas, Transparansi terhadap Pengelolaan

Keuangan. Berdasarkan hasil output SPSS (tabel 7), maka diperoleh nilai t_{hitung} variabel Akuntabilitas lebih besar dari nilai t_{tabel} ($3,021 > 1,669$) dengan tingkat signifikan di bawah 0,05 yaitu 0,004 dan t_{hitung} Transparansi lebih besar dari nilai t_{tabel} ($3,342 > 1,669$) dengan tingkat signifikan di bawah 0,05 yaitu 0,001.

Tabel 7. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	7,022	1,588		4,423
	Akuntabilitas X1	,242	,080	,325	3,021
	Transparansi X2	,334	,100	,360	3,342

Berdasarkan cara pengambilan keputusan uji parsial dalam analisis regresi dapat disimpulkan bahwa; 1) Variabel Akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan. 2) Variabel Transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan.

Uji Signifikan Model (Uji - F)

Uji ini digunakan untuk membuktikan Akuntabilitas, Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan.

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F (Uji Simultan)

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	68,958	2	34,479	17,003
	Residual	139,917	69	2,028	
	Total	208,875	71		

Berdasarkan hasil, maka diperoleh nilai F_{hitung} variabel Akuntabilitas dan Transparansi lebih besar dari nilai F_{tabel} ($17,003 > 3,12$) dengan tingkat signifikan di bawah 0,05 yaitu <,001. Berdasarkan cara pengambilan keputusan uji simultan dalam analisis regresi dapat disimpulkan sebagai berikut: Variabel Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan di pemerintahan Kabupaten Bireuen.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

- Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, dibuktikan uji statistik. Sehingga, disimpulkan akuntabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan maupun menurunkan pengelolaan keuangan. Oleh karenanya, untuk meningkatkan pengelolaan

keuangan maka akuntabilitas harus ditingkatkan.

- b) Dan dari hasil uji lainnya, transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Artinya transparansi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan maupun menurunkan pengelolaan keuangan. Oleh karenanya, untuk meningkatkan pengelolaan keuangan maka transparansi harus ditingkatkan.
- c) Akuntabilitas dan Transparansi secara Bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Maka untuk meningkatkan pengelolaan keuangan diperlukan akuntabilitas yang dapat menghasilkan pengelolaan keuangan yang relevan dan akurat dan juga transparansi yang besar dalam diri pegawai sehingga terbentuknya pengelolaan keuangan yang benar dan tepat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan, yaitu:

1. Bagi pimpinan BPKD Bireuen diharapkan agar dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dengan memperhatikan akuntabilitas dan transparansi dengan cara mempublikasi pengelolaan keuangan.
2. Diharapkan agar pegawai memiliki inisiatif sendiri dan meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja guna meningkatkan pengelolaan keuangan yang berkualitas
3. Diharapkan bagi pegawai agar meningkatkan tanggung jawab dalam bekerja guna meningkatkan pengelolaan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya, M., & Sudana, I. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 11(2), 611–628.
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2). <https://doi.org/10.17977/Um004v6i22019p334>
- Crystallography, X. D. (2016). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Akseibilitas Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara*. 10(2), 1–23.
- Darma, N. D. A. (2019). Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. BPFE.
- Jamaluddin, J., Iqbal, M., Patria, A., Yahya, Z., & ... (2022). Analisis Partisipasi Anggaran Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPKD Kabupaten Bireuen. *ARBITRASE: Journal Of ...*, 3(2), 414–420. <https://doi.org/10.47065/Arbitrase.V3i2.542>
- Muhajir, I. (2019). Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.35973/Jidh.V4i1.1346>
- Risma Handayani, N. P., & Surya Abadi, I. B. G. (2020). Pengaruh Model Pembelajaran Langsung Berbantuan Media Gambar Terhadap Kompetensi Pengetahuan Matematika Siswa Kelas IV SD. *Mimbar Ilmu*, 25(1), 120. <https://doi.org/10.23887/Mi.V25i1.24767>
- Septian, R. L., Wawo, A., & Jannah, R. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting And Finance Review*, 2(2), 179–193. <https://doi.org/10.24252/Isafir.V2i2.25485>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan*. 95.
- Sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Pustaka Baru Pers, 2015.
- Suparyanto Dan Rosad. (2020). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. In *Suparyanto Dan Rosad (2015 (Vol. 5, Issue 3)*.
- Tamara, C. A., & Konde, Y. T. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Publik Terhadap Mekanisme Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 1(1), 1–11. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/Article/View/181>
- Widarjono. (2018). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya Disertai Panduan EvIEWS (5th Ed.)*. UPP STIM YKPN Yogyakarta